

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA HUTAN MELALUI INTENSITAS PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN
DEMI KEBERLANJUTAN PROGRAM HUTAN SOSIAL DI KABUPATEN NGAWI, JAWA TIMUR

Sukarno-Hs; Rudy Handoko; Joko Priyono; Gatot Sargiman;
D. Jupriyono; Jupri Ahmad

ABSTRACT

The paradigm transition of forest management from state based forest management to community based forest management (CBFM) give color to the issue settlement effort of Indonesian global environment. From the research based on education for sustainable development which applies research and development on the management of forest resource with society (PHBM) in Ngawi Regency, the results can be show as follow: (a) There are more than 12.000ha (30% of the land area) owned by forest caretaker unity (kesatuan pemangku hutan KPH) Perum Perhutani Ngawi, which is potential to become the area for shelter enduring plant cultivation (Porang), (b) generally (more than 80%) forest farmers have known Porang plant type, however there are still few of them (< 30%) in the cultivation experience, (c) almost all (90%) of forest farmers have willingness in Porang cultivation entrepreneurship and have big chance to reveal it because there is guarantee from (i) Government cq Perum Perhutani in making use of the sustainable area utility, (ii) Regency Government cq Forestry and Plantation Department Dinas Kehutanan dan Perkebunan and Provincial Government cq East Java Bapemas in the facility of forest villager organization (LMDH), (iii) stakeholders in the fund, seeds, and fertilizer supply, (iv) more than 60% of forest farmers have willingness to cooperate with other department to endeavor the additional value of the shelter enduring plant and to market it, and (v) more than 50% of them declare to be capable in cooperating with other departments to make Ngawi city to be Industrial centre of shelter enduring plant and (d) forest farmers generally are ready to develop knowledge and continue other activities based on ESD, also to spread to others included to their heredities.

Keywords: *empowering, entrepreneurship of plantation, social forestry*

Masalah lingkungan menjadi topik yang penting pada dua abad terakhir ini karena masalah tersebut terkait erat dengan keberlangsungan hidup umat manusia. *UN Climate Change Conference* pada 3-14 Desember 2007 di Bali (Indonesia) salah satunya membahas peranan hutan sebagai pengendali perubahan iklim melalui penyerapan karbon. Sejalan dengan itu, untuk menunjang peningkatan kesejahteraan, salah satu arah dan kebijakan yang diprioritaskan melalui pembangunan nasional di Indonesia adalah revitalisasi di bidang kehutanan. Lahirnya Orde Reformasi di Indonesia bersamaan dengan peralihan paradigma pengelolaan hutan, yaitu dari *state based forest management* menuju ke *community based forest management* (CBFM). CBFM menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam

mengambil manfaat, menentukan bentuk dan kelembagaan perusahaan, sedangkan pemerintah sebagai fasilitator dan pemantau kegiatan.

Salah satu wilayah penyelenggara program hutan sosial yang dikenal dengan sebutan program pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat (PHBM) adalah Kabupaten Ngawi. Berdasarkan penelitian Hardjosoewito (2009) tentang tata kelola hutan sosial dan Handoko dkk. (2009) tentang pemberdayaan masyarakat desa hutan di wilayah tersebut, ditemukan antara lain sebagai berikut: (1) organisasi masyarakat desa hutan, tepatnya lembaga masyarakat desa hutan (LMDH), memiliki variasi dalam tingkat kemandiriannya, (2) masih ditemukan petani hutan yang memiliki sikap dan perilaku berorientasi jangka pendek, dan perilaku ini dapat menghambat keberlangsungan program hutan sosial, dan (3) program hutan sosial melalui PHBM masih belum berhasil memberdayakan masyarakat desa hutan (hanya 13,5%).

Terdapat tiga matra pemberdayaan (*empowerment setting*), (1) Aras mikro: pemberdayaan dilakukan dengan bimbingan individual (petani hutan sebagai anggota lembaga masyarakat desa hutan/LMDH), (2) Aras mezzo: pemberdayaan dilakukan kepada sekelompok klien (seluruh anggota LMDH); dan (3). Aras Makro. Pendekatan ini juga disebut sebagai Strategi Sistem Besar (*large-system strategy*), pemberdayaan dilakukan bagi LMDH di Indonesia (diadopsi dari Nawawi, 2006: 98-99). Kepada mereka diterapi penciptaan lingkungan yang kondusif, penggalan dan pengembangan potensi lembaga, perlindungan terhadap yang lemah atas pempedayaan yang kuat atau kepada mereka diberikan terapi 5P, yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. (Kartasmita, 1995:19-20). Dengan demikian, pandangan Prawase Warsi tentang *community forestry* (hutan sosial) dapat terwujud, yakni antara lain terkait dengan nilai: (1) ekonomi, di mana hutan sosial efektif untuk mengurangi kemiskinan dan mendorong pemerataan pendapatan dan kewaspadaan, lebih-lebih jika diintegrasikan dengan industri rakyat, dan (2) interaksi sosial, komunitas menjaga agar orang tetap berada di lingkungan rumah dan komunitasnya, sementara industrialisasi justru memisahkan mereka (<http://www.latin.or.id> dalam Hardjosoewito, 2009: 54).

Sementara itu, pendekatan pembangunan yang cenderung memandang rakyat sebagai objek amaliah melalui *charity strategy*, pendekatan *patronizing*, asuh (*nurture*), dan proteksi (Korten dan Alfonso, 1982 dalam Tjokrowinoto, 2004: 217) makin meningkatkan dependensi masyarakat terhadap birokrasi dan menjadi kendala bagi tercapainya pembangunan-berkelanjutan (*sustained development*). Terwujudnya nilai sosial-ekonomi hutan sosial,

sejalan dengan penerapan *community-based resource management* sebagai bentuk manajemen pembangunan yang mengubah peranan birokrasi pemerintah dari “merencanakan dan melaksanakan pembangunan untuk rakyat” menjadi “menciptakan kondisi yang menimbulkan kemampuan bagi rakyat dan masyarakat untuk membangun diri mereka sendiri” (Tjokrowinoto, 2004: 223-224 dalam Hardjosoewito, 2009: 50).

Kondisi itu memungkinkan seseorang melaksanakan lima tahapan dalam memulai wirausaha, yakni: (1) memilih usaha yang akan ditekuni dengan memperhatikan: (a) seberapa besar potensi pendapatannya, (b) disukai dan dapat dilakukan atau tidak, (c) hambatannya apa saja, (d) seberapa besar tingkat resiko, dalam memilih dapat dilakukan dengan *modify*, *idea* atau *copy* usaha lain; (2) melakukan usaha dengan segera, supaya dapat diketahui hasilnya; (3) membuat sistem, biasanya meliputi: (a) administrasi, (b) komputerisasi, (c) marketing, dan (d) gudang, sistem akan menghemat waktu, uang, dan membuat usaha berjalan secara efektif dan efisien; (4) melakukan ekspansi (besarkan usaha), dengan keyakinan bahwa: (a) pendapatan dapat diperbesar, (b) resiko dapat disebarkan, dan (c) justru karena setiap orang tidak tahu apa yang akan terjadi.; dan (5) mengadakan diversifikasi (aneka *income*) yakni memperluas variasi usaha tanpa harus membuka usaha baru. (Julianto, n.a.: 9-69) Kemungkinan itulah yang ingin ditelusur lebih jauh pada para petani hutan peserta program hutan sosial di daerah penelitian.

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan dengan tema pemberdayaan masyarakat desa hutan melalui pengembangan pendidikan berbasis *education for sustainable development* (ESD) ini merupakan wujud perpaduan antara penelitian (*research and development*) dengan program pengabdian kepada masyarakat (KKN Tematik). Strategi dan langkah penelitian adalah sbb.: (1) pengumpulan data tentang potensi dan masalah yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa sebagai peneliti dan asisten peneliti; (2) analisis terhadap data lapangan (kejadian yang senyatanya) yang dilakukan oleh petani hutan, (3) menyusun disain produk, yaitu berupa perancangan model; (4) uji coba disain produk (rancangan model) disertai pendampingan oleh dosen dan mahasiswa kepada para petani hutan (anggota LMDH) yang merupakan pelaksanaan KKN Tematik; (5) analisis hasil uji coba rancangan model; dan (6) revisi rancangan model menjadi model. Signifikansi perbedaan kinerja model pemberdayaan hasil uji coba dengan yang baru (pasca-uji coba yang telah mendapat perbaikan) diuji secara statistik dengan *t-test* berkorelasi.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara secara mendalam kepada para petani hutan baik pengurus maupun anggota LMDH, diperoleh informasi bahwa semua lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) telah berstatus formal (hukum) dengan penetapan Notaris kota Ngawi, yang berarti telah memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). Pertemuan anggota dan pengurus LMDH sangat bervariasi frekuensinya dalam rentangan: (1) seminggu sekali hingga selapan (35 hari) sekali untuk pertemuan pengurus, dan (2) sebulan sekali hingga 3 bulan sekali untuk pertemuan anggota LMDH. Umumnya LMDH baru bekerjasama dengan institusi di kecamatan dalam satu kabupaten yakni dengan badan perwakilan desa (BPD) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tidak lain adalah pendamping LMDH yang ditunjuk oleh Perum Perhutani dan atau oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Ngawi. Kendati demikian, mereka siap untuk bekerjasama dengan institusi di luar terutama dalam kaitannya dengan budi daya tanaman tahan teduh dengan prinsip tidak merugikan petani hutan dalam bentuk apapun lebih-lebih finansial. Berdasarkan cerita pengalaman, beberapa pengurus LMDH pernah melakukan kerjasama dalam budi daya tanaman dengan pihak pengusaha, di mana petani hutan diminta menanam tanaman jenis tertentu, namun ternyata pengusaha tidak bersedia membeli produk tanaman tersebut. Pengalaman pahit ini menjadi kendala bagi mereka untuk mengulang pada even berikutnya.

Pengalaman bekerja sama dengan tanpa perjanjian yang jelas di masa lalu menjadikan petani hutan antusias untuk memperoleh pengetahuan dan ketrampilan dalam menyusun perjanjian kerjasama, sebagaimana tim peneliti ESD ini lakukan. Pada acara Temu Wicara sebagai awal dilaksanakannya penelitian ini mereka (petani hutan) telah diperkenalkan urgensi dan pengetahuan umum dan strategi serta pembuatan naskah kerja sama yang diteruskan dalam pendampingan dosen-mahasiswa dilokasi penelitian. Antusiasme petani hutan untuk berkemampuan dalam membuat perjanjian kerja sama ini merupakan indikasi bahwa mereka sangat patuh hukum; jika terdapat perspektif, kelak akan memetik buahnya secara ekonomis. Berbeda dengan sebelumnya bahwa mengapa mereka cenderung melanggar perjanjian kerja sama yang mereka tanda tangani bersama Perum Perhutani, karena selama itu pula mereka merasa tidak ada jaminan untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi lebih lebih secara berkelanjutan.

Pengetahuan, pengalaman, dan kesediaan petani hutan tepatnya pengurus lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) tentang budi daya tanaman tahan teduh adalah sebagai berikut: (a) umumnya mereka lebih mengenal tanaman tahan teduh jenis porang, kunci pepet dan temu lawak, dari pada jenis tanaman hias yakni sikas dan lidah mertua, dan (b)

pengalaman Pengurus LMDH dalam menanam tanaman tahan teduh untuk semua jenis sangat minim (Tabel 1), kecuali temu lawak dan kunci pepet meski rendah, tetapi masih ada yang berpengalaman (20% dan 22%) dibandingkan dengan porang (8%) dan tanaman hias (sikas dan lidah mertua) yang hanya 0%, dan (c) kesediaan petani hutan untuk membudidayakan tanaman tahan teduh cukup tinggi berturut-turut temu lawak (66%), porang (64%), kunci pepet (62%), tanaman hias (28%). Fakta tersebut menunjukkan bahwa meskipun petani hutan telah mengenal tanaman tahan teduh namun belum mengetahui manfaat yang lebih bernilai ekonomi tinggi, tidak akan berupaya membudidayakan tanaman tersebut. Pengalaman petani hutan dalam menanam jenis tanaman tahan teduh cukup minim, ternyata sebagai akibat: (a) minimnya pengetahuan terutama untuk jenis tanaman hias, (b) pengalaman pahit masa silam yakni beberapa petani hutan pernah melakukan kerjasama dalam penanaman temu lawak, kunci pepet, dan porang namun tidak berakhir dengan baik akibat tanpa ada perjanjian kerjasama yang menguatkan.

Keadaan demikian sangat mengkhawatirkan karena dapat memangkas keswadayaan petani (hutan) dalam budi daya tanaman. Indra Tri Kurniawan (2004) dalam penelitian pada “Proyek Pengembangan Agribisnis Kedelai di Kabupaten Mojokerto” menengarai adanya kekhawatiran yang serupa meski dalam konteks yang berbeda. Melalui proyek pengembangan agribisnis kedelai, ternyata jaringan kerjasama antara birokrat- LSM tidak mampu membentuk dan mengembangkan kemitraan dengan pihak terkait serta berperan penting dalam memberdayakan masyarakat (petani kedelai) untuk meningkatkan produksi tanamannya. Masih ada kendala ekonomis berupa harga jual kedelai masih lebih rendah dari biaya produksi, sehingga perlu meningkatkan efektifitas kerjasama atau jaringan tersebut. Diduga karena organisasi bentukan bukan tumbuh dari masyarakat sendiri, sebagai salah satu pemicu ketidakberhasilan tersebut.

Potensi kemandirian petani hutan dalam budi daya tanaman tahan teduh sebagaimana tersebut pada Tabel 2, di mana petani hutan akan bersedia mandiri dalam hal memanen (80%) dan yang terendah adalah mengusahakan bibit (27,5%). Petani hutan pada dasarnya bersedia untuk bekerjasama dalam budi daya tanaman tahan teduh pada semua aktivitas sejak penyediaan bibit, hingga menangani industri (dalam rentangan 80% hingga 90%). Linier dengan kemandirian dan kesediaannya bekerjasama (Tabel 3), petani hutan umumnya enggan untuk menyerahkan urusan budi daya tanaman tahan teduh kepada pihak lain, terbukti hampir untuk semua urusan kecuali pengadaan bibit baik menurut persepsi Pengurus LMDH (95%) maupun Anggota LMDH (86,7%).

Aparat Perum Perhutani beranggapan (Tabel 4) bahwa petani hutan sangat riskan (khawatir) untuk menyerahkan kepada pihak lain dalam hal memanen hasil (10%) dan memasarkannya (12%). Menurut dosen-mahasiswa, kekhawatiran petani hutan untuk menyerahkan urusan kepada pihak lain adalah dalam hal penanganan industri kelak karena umumnya mereka ingin sekali untuk terlibat (tidak mau dikesampinggabaikan). Dalam hal menanam, petani hutan enggan menyerahkan kepada pihak lain (12,5%), tetapi menurut persepsi aparat, justru lebih baik diserahkan kepada pihak lain (65%) khawatir kalau salah teknologi penanamannya. Kekhawatiran ini justru kurang mendukung upaya penumbuhan jiwa dan sikap wirausaha para petani hutan dalam budi dayakan tanaman tahan teduh.

Potensi ekonomi usaha tanaman tahan teduh adalah sbb. (1) *Porang*, untuk penanaman tanaman Porang pada lahan 0,25 ha diperlukan biaya Rp. 1,5 juta meliputi biaya pengadaan bibit hingga pemanenan. Biaya tersebut menjadi sangat murah kalau tenaga kerja berasal dari keluarga sendiri. Ketika petani hutan telah memetik hasilnya mereka akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 1,3 juta (Rp 2,8 juta minus Rp 1,5 juta) jika penjualan berupa buah, Rp 2,1 juta (Rp 3,6 juta minus Rp 1,5 juta) jika berupa Chips, dan Rp 2,7 juta (Rp 4,2 juta minus Rp 1,5 juta) jika berupa tepung. Keuntungan itu dipetik selama masa panen yaitu 2-3 tahun dan dapat diupayakan secara rotasional. Tanaman jenis Porang dapat dimanfaatkan menjadi makanan (Tahu, Me, Cake dll), obat (obat diabet, diet dll) dan bahan industri (lem, jely dll) yang belum terhitung nilai tambahnya. (2) *Empon-empon*, keuntungan yang diperoleh petani hutan dalam budi daya tanam tanaman tahan teduh jenis obat-obatan dalam lahan seluar 0,25 ha cukup besar yakni Rp 5,13 juta (Rp 6,25 juta dikurangi Rp 1,12 juta) untuk semua jenis tanaman. (3) *Hias*, potensi tersebut akan menjadi lebih besar nilai ekonominya jika jenis tanaman yang dimaksud adalah jenis tanaman hias, mengingat keuntungan atau selisih harga jual di pasaran dengan biaya budi daya cukup tinggi yakni sebesar Rp 6,6 juta (Rp 8 juta dikurangi Rp 1,4 juta). Keuntungan itu akan menjadi lebih besar jika penanganan budi daya dilakukan secara mandiri (swadaya). Nilai tambah itu akan menjadi besar dan berakumulasi dari seluruh petani hutan jika terdapat “Sentra Industri” di Kota tempat penelitian (Ngawi).

Berdasarkan hasil penelitian yang ditujukan kepada petani hutan, aparat Perum Perhutani, dosen dan mahasiswa tentang potensi education for sustainable development (ESD) terkait dengan objek penelitian dan program ESD itu sendiri, terdapat hasil antara lain sebagai berikut. (1) Umumnya terutama mahasiswa yang ikut *choaching* menjelang pelaksanaan penelitian mengetahui tentang esensi ESD dan mengetahui tujuan penelitian

yang sedang dilakukan dalam perspektif ESD, mahasiswa juga bersedia meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan tentang ESD. (2) Para petani hutan termasuk pengurus LMDH umumnya berpendapat yang sama dengan para mahasiswa, demikian pula para aparat Perum Perhutani, artinya mereka bersedia mengembangkan pengetahuan, bersedia melanjutkan kegiatan lain yang berbasis ESD, bersedia menghadiri acara lain yang seanalogue dengan Temu Wicara, yakni berbasis ESD, serta bersedia menularkan pengetahuan ESD kepada pihak lain termasuk kepada anak cucu kelak.

Hasil ini sejalan dengan misi dari perguruan tinggi dalam melaksanakan fungsinya terkait dengan penelitian berbasis ESD. Perguruan Tinggi harus berperan: memberi informasi penyadaran, pembelajaran, mobilisasi masa/komunitas, dan gerakkan bangsa ke arah kehidupan masa depan yang berkembang secara lebih berkelanjutan (*more sustainably developed*). Peran tersebut dilakukan melalui riset yang berbasis *Education for Sustainable Development* (ESD). ESD merupakan pengembangan pembelajaran berbasis riset untuk Mahasiswa (generasi muda) tentang pengatasan permasalahan global secara Berkelanjutan yang kemudian langsung diimplementasikan melalui pemberdayaan masyarakat. Riset ESD adalah pengembangan riset oleh para dosen yang mendukung ESD hasil riset diimplementasikan untuk memberdayakan komunitas selama waktu tertentu pada daerah yang ingin diberdayakan melalui penerjunan sekelompok mahasiswa di bawah pengawasan dan bimbingan dosen pelaksana riset. Penelitian ESD diharapkan melahirkan potensi meningkatnya: (1) pemahaman dan penguasaan program-program ESD bagi staf pengajar, mahasiswa dan masyarakat, (2) kualitas kegiatan yang berbasis ESD, (3) promosi program-program ESD pada masyarakat, pemerintah daerah dan stakeholders, dan (4) jejaring kerjasama dalam pelaksanaan dan pengembangan ESD di Indonesia pada khususnya dan di dunia pada umumnya.

Penelitian ini dapat berdampak kepada alih teknologi terapan yang dilakukan oleh masyarakat desa hutan, yakni dari rekayasa penanaman tanaman pertanian semusim yang dikenal dengan 'polowijo' ke arah rekayasa penanaman tanaman tahan teduh berorientasi tahunan beserta budi daya serta pengolahan industrinya

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di muka dapat disimpulkan sebagai berikut.

(a) Terdapat lebih dari 12 ribu ha lahan milik Perum Perhutani kesatuan pemangku hutan (KPH) Ngawi potensial untuk dijadikan tempat pembudidayaan tanaman tahan teduh.

(b) Umumnya (lebih 80%) petani hutan yang tergabung dalam lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) telah mengenal jenis tanaman tahan teduh yang ingin dibudidayakan (terutama jenis tanaman pangan dan industri yakni Porang), namun demikian masih sedikit (kurang dari 30%) dari mereka yang berpengalaman membudidayakannya karena faktor modal dalam mendapatkan bibit, dan pupuk.

(c) Hampir semua (96%) petani hutan bersedia membudidayakan tanaman tahan teduh terutama 'Porang' dan jenis obat-obatan dan kemungkinan besar dapat terwujud karena: (i) pihak Perum Perhutani berketetapan untuk melanjutkan kerjasama dengan LMDH dalam hal pemanfaatan lahan sepanjang usia daur tanaman pokok kehutanan (berarti sepanjang masa), (ii) terdapat pihak yang potensial bersedia bekerjasama dengan LMDH dalam hal penyediaan bibit dan pupuk (atau dana untuk pengadaan bibit dan pupuk), (iii) hampir semua (95%) petani hutan bersedia melaksanakan pekerjaan seperti: menanam, merawat/ menyiangi, mengamankan, memetik/ memanen, mengangkut hasil, (iv) lebih dari 60% petani hutan bersedia bekerjasama dengan pihak lain untuk membudidayakan (mengupayakan nilai tambah) tanaman tahan teduh dan memasarkannya, dan (v) lebih dari 50% dari mereka (petani hutan) yang menyatakan berkemampuan untuk bekerjasama dengan pihak lain dalam hal menjadikan Kota Ngawi sebagai 'Sentra Industri Tanaman Tahan Teduh' dan pernyataan ini didukung oleh penilaian aparat perum Perhutani KPH Ngawi, di mana lebih 80% dari aparat yang menjadi sampel menyatakan mendukung berdirinya sentra industri tersebut.

(d) Para petani hutan termasuk pengurus LMDH umumnya berpendapat yang sama dengan para mahasiswa, demikian pula para aparat Perum Perhutani, yakni mereka bersedia mengembangkan pengetahuan, bersedia melanjutkan kegiatan lain yang berbasis ESD, bersedia menghadiri acara lain yang seanalogue dengan Temu Wicara yakni berbasis ESD, serta bersedia menularkan pengetahuan ESD kepada pihak lain termasuk kepada anak cucu kelak.

DAFTAR PUSTAKA

Handoko, V. Rudy dkk. 2009. Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Melalui Pengelolaan Hutan Sosial Secara Sinergis-Adaptif-Berkelanjutan. *DELEGASI*, No.2 Tahun VIII

Mei-Juni-Juli-Agustus 2009

- Hardjosoewito, Sukarno 2009. *Tata Kelola Hutan Sosial secara Sinergis-Adaptif-Berkelanjutan: Studi pada Program PHBM dan Hutan Rakyat di Kabupaten Surabaya*: Untag Press
- Julianto. N.a. *Bussines is Esay*. Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945.
- Kurniawan, Indra T 2004. *Efektifitas Kerjasama Birokrasi dengan LSM dalam Pemberdayaan Masyarakat: Proyek Pengembangan Agribisnis Kedelai di Kabupaten Mojokerto*. Disertasi . Surabaya: PPS-Universitas 17 Agustus 1945
- Mukadasi, Buyinza. 2008. Participatory Indicators of Success of Community Programs in Uganda. *Jurnal Ilmu Kehutanan Vol II No 2-Juli 2008* hal 70-81 Yogyakarta: Fakultas Kehutanan-Universitas Gadjah Mada.
- Perum Perhutani, 1996. *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan di Pulau Jawa*, Jakarta: PT Adiluhung.
- Riyanto, Budi. 2004. *Selayang Pandang Pengelolaan Kawasan Hutan Di Indonesia*. Penyunting Suwanto. Bogor: LPHKL
- Siswoko, Bowo Budi. 2009. Good Forest Governance: Sebuah Keniscayaan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Lestari. *Jurnal Ilmu Kehutanan Vol III No Januari 2009* hal 1-12 Yogyakarta: Fakultas Kehutanan-Universitas Gadjah Mada.
- Soekamto, Hadi, Riyadi Soeprapto, Irwan Noor. 2004. Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang). *Jurnal Ilmu Administrasi Vol. IV, No.2, Maret – Agustus 2004*. Malang: Program Pascasarjana-Universitas Brawijaya
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suprayitno, Adi Riyanto. 2009. *Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan*. <http://asury.blogspot.com/2009/02>. Minggu, Februari 15, 2009